

KORELASI PEDAGOGIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Leni Yulia¹ & Zihan Suryani²
Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2}

Abstrak

Pendidikan Indonesia dewasa ini masih dihadapkan dengan problematika mutu Pendidikan yang rendah. Kualitas, sarana prasarana, layanan, tenaga pendidik serta kebijakan-kebijakan Pendidikan yang masih jauh dari mutu berkualitas merupakan salah satu dampak penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Adanya upaya peningkatan yang terus digempurkan pada mutu Pendidikan akan berdampak besar pada aspek-aspek Pendidikan. Upaya peningkatan harus difokuskan terutama pada tenaga pendidik. Kompetensi pedagogik pendidik menjadi fokus utama dalam mengimplementasikan mutu Pendidikan yang berkualitas. Disamping itu, kebijakan-kebijakan Pendidikan sangat berandil besar dalam menata dan mengatur sistem Pendidikan

Kata Kunci: Pedagogik, Mutu Pendidikan, Kebijakan Pendidikan

Abstract

Indonesian education today is still faced with the problem of low quality education. The quality, infrastructure, services, teaching staff and educational policies that are still far from qualified are one of the causes of the low quality of Indonesia's human resources. The existence of continuous efforts to improve the quality of education will have a major impact on aspects of education. Improvement efforts should be focused primarily on teaching staff. The pedagogic competence of educators is the main focus in implementing quality education. In addition, education policies play a major role in organizing and regulating the education system

Keywords: Pedagogy, Quality of Education, Education Policy



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan serta kualitas yang dimiliki manusia akan mempengaruhi taraf dan martabat hidup. Berdasarkan hal tersebut ini sejalan dengan (Tjalla, A.: 2010) menyebutkan bahwa Pendidikan adalah proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara keseluruhan. Pendidikan yang merupakan proses secara sistematis, artinya Pendidikan didapatkan dengan proses secara teratur dan tidak sembarangan. Salah satu cara mendapatkan Pendidikan atau ilmu adalah dengan belajar. Manusia sejatinya mendapatkan Pendidikan adalah dengan belajar. Dengan belajar manusia diharapkan membawa hasil berupa perubahan yang akan menghantarkan pada hal-hal yang lebih baik. Berdasarkan hal

tersebut (Pane & Dasopang: 2017) menyebutkan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah mengarah pada perubahan tingkah laku dan pemahaman menjadi lebih baik.

Permasalahan pendidikan yang dihadapi Indonesia salah satunya adalah permasalahan mutu pendidikan yang rendah dan kurang merata. Akibat dari permasalahan dalam bidang Pendidikan, terutama pada kualitas mutu Pendidikan yang rendah, berdampak pada sumber daya manusia yang kurang atau bahkan tidak berkualitas. Hal tersebut merupakan wujud dari kurang baiknya proses pembelajaran yang berdampak pada mutu pendidikan. Sejalan dengan (Kurniawan:

2016) menyebutkan pembelajaran yang kurang optimal mengakibatkan nilai tes yang baik, namun dikatakan hasil belajar itu semu. Hal ini mengindikasikan terdapat masalah pada kualitas pendidikan yang berkaitan dengan pemrosesan pembelajaran.

Oleh sebab itu, untuk bisa mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam bidang Pendidikan, perlu adanya upaya peningkatan mutu Pendidikan dari beberapa aspek pentingnya. Berdasarkan hal tersebut, aspek penting yang perlu terus adanya peningkatan menjadi lebih baik yaitu pertama dari segi pendidikannya. Guru pada hakikatnya merupakan jantung Pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi yang berkualitas diyakini sangat berpengaruh pada dunia Pendidikan.

Sebagaimana yang diungkap oleh (Aliyyah :2019) Guru adalah variabel utama yang menentukan mutu pendidikan. Maka dari itu, untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik diperlukan kinerja, kompetensi yang baik pula dari guru dalam menjalankan tugasnya. Kedua kebijakan Pendidikan, hal yang paling utama dalam system Pendidikan adalah bagaimana dan seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan dalam proses Pendidikan itu terwujud dan terlaksana sesuai dengan kebutuhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Sejalan dengan (Koyan, I. W: 2014) menyebutkan bahwa metode kualitatif adalah siasat atau tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber, orang-orang atau perilaku yang diamati. Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari studi Pustaka atau kajian literatur yang didapatkan dari

sumber-sumber Pustaka yang relevan serta sesuai dengan topik yang dibahas.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil studi pustaka, maka metode ini dapat disebut kajian pustaka. Menurut Yusuf, & Khasanah, (2019) menyebutkan bahwa sebuah kajian pustaka merupakan penjelasan atau uraian yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang berbagai literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Kajian tersebut memberikan tinjauan, analisis dan gambaran mengenai apa yang telah dibahas atau yang telah dibicarakan oleh penulis atau peneliti yang dikaitkan dengan teori atau hipotesis yang mendukung dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Masalah pendidikan di Indonesia

Salah satu icon penting bagi kehidupan bangsa adalah UUD 1945, kutipan pada alinea keempat “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan tujuan bangsa Indonesia. Dengan ini jelas diharapkan setiap warga negara bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan fantastis. Yaitu pada tahun 60-an tenaga pengajar dari Indonesia banyak dibutuhkan untuk membantu mengajar di negara tetangga, juga tidak sedikit yang mengambil pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Manusia dengan pendidikan merupakan suatu unsur kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sangat penting dan harus bagi manusia memiliki pendidikan yang berkualitas sebagai lentera dalam kehidupannya (E Nasution, 2016).

Dalam aspek pendidikan sebenarnya Indonesia belum menyentuh kesempurnaan, masih banyak problematika yang dialami seperti kualitas,

kurikulum, juga kompetensi baik dalam kepemimpinan maupun struktur dibawahnya. Banyak keluhan-keluhan yang diajukan mengenai rumpangnya struktur pendidikan, bahwa bagian dari tenaga pendidik maupun bagian pimpinan sekolah sangat menyangkan dimensi-dimensi kepemimpinan yang bongkar-bangkir yaitu pada manajemen, administrasi bahkan birokrasi (E Nasution, 2016).

Pendidikan di Indonesia jika dilihat aspek politik diuruskan sebagai alat keuntungan tertentu. Pendidikan terlalu diarahkan terhadap kepentingan penguasa, dimana ketika sang penguasa membutuhkan sesuatu yang dapat menguatkan politiknya maka kearah itulah pendidikan juga diarahkan (Tilaar, H.A.R. 2006). Oleh karena itu pendidikan menjadi sumber perebutan bagi partai politik dalam tujuan meraih keuntungan. Karena masalah pendidikan ini sangat trending atau sangat dapat menarik perhatian rakyat. Demi kepentingan serta keuntungan golongan partai politik akan mengotak atik ranah pendidikan. Yang dengan ini berarti pendidikan bukan lagi prospek yang akan membangun manusia.

Jika diperhatikan dalam sistem pendidikan pergantian materi dengan pergantian kurikulum hampir selalu berbarengan. Sebenarnya pergantian kurikulum ini tidak terlalu bermasalah karena dengan adanya pergantian ini diharapkan akan membantu terhadap permasalahan global yang perlu disesuaikan. Dalam hal penunjang pendidikan seperti buku juga dapat menjadi permasalahan dalam pendidikan, dimana ketika pergantian kurikulum maka akan terjadi pergantian buku dan ini akan memberatkan setiap orang tua yang harus membeli demi memenuhi sarana pendidikan anak. Selain itu bagi sekolah yang berada di tempat terpencil masih mengalami kendala dalam sarana prasarana, ketersediaan buku yang tidak

memenuhi dimana ini adalah penunjang terpenting untuk meraih keberhasilan proses belajar, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium masih banyak kendala. Yang harus diperhatikan dalam problematika ini adalah kesadaran pemimpin juga dana pendidikan yang dialokasikan harus sesuai.

PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2018 mengeluarkan hasil survei bahwa Indonesia menempati posisi 6 terendah dari 79 negara lainnya dalam survei (FNA. Kurniawati, 2022). menurut Kurniawan, keberhasilan pendidikan dalam suatu sistem dapat ditentukan oleh, peserta didik, guru, sarana prasarana, ekonomi, lingkungan, dan faktor lainnya (Kurniawan: 2016). Indonesia kurang lebih sudah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 10 sampai 11 kali sejak merdeka. Pergantian kurikulum yang terlalu sering ini sebenarnya dapat membingungkan, karena tentu akan banyak perubahan yang terjadi dalam semua perangkat pendidikan.

Karena perubahan ini terlalu memberi pengaruh besar, menurut Nasution perubahan kurikulum ini disebut perubahan sosial atau *social change*. (Nasution: 2009: 252). Akibat dari perubahan ini, dapat membuat bingung peserta didik juga akan menjadi beban dengan banyaknya materi yang harus dikuasai. Pendidik pun tentu mengalami kesulitan karena harus mempelajari materi-materi dan tugas baru, dan berdampak tidak optimalnya pembelajaran. Selain itu permasalahan yang kerap terjadi dalam pendidikan di Indonesia adalah penempatan guru yang tidak sesuai dengan keahliannya, yang tentu saja ini akan menghambat pembelajaran. Salah satu faktor ketidaklayakan guru dalam mengajar adalah bidang studi yang diajarkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (Jakaria: 2014).

Kualitas guru tentu sangat menentukan kualitas pendidikan, banyak guru yang melakukan tugasnya hanya sebagai tuntutan pekerjaan yang tidak dibarengi dengan hati atau perasaan. Untuk profesi guru di Indonesia ini memang belum sejaya guru di negara luar. Beberapa orang berpendapat ketika jadi guru kita harus benar-benar ikhlas, karena tentu tidak mudah untuk mengambil profesi ini dilihat dari banyaknya tuntutan serta tanggung jawab yang harus dilakukan. Indonesia sangat membutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas. Sesuai dengan pendapat Suparno, bahwa pendidikan di Indonesia ini sangat membutuhkan guru yang mengerjakan tugasnya tidak hanya sekedar untuk panggilan pekerjaan saja (Suparno, 2004). Guru memiliki kewajiban untuk mengajar, melatih, mendidik, membimbing dan menilai setiap siswanya. Dan baik bagi setiap guru untuk melakukan kewajiban sebaik-baiknya. Guru juga mesti memiliki inovasi agar metode pembelajaran yang diterapkan tidak monoton. Memperbanyak kreativitas dalam penyusunan pembelajaran.

Pembahasan

Kompetensi pedagogik

Dalam mewujudkan Pendidikan yang bermutu, guru sebagai jantung utama dalam Pendidikan dan faktor utama dalam tercapainya pendidikan, seorang guru harus memiliki kompetensi atau keterampilan yang berkualitas serta sesuai bidangnya terutama dalam kompetensi pedagogik. Depdiknas, 2003 dalam (Febriani, 2021) menyebutkan Kompetensi adalah seperangkat kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta nilai dasar yang digambarkan atau dituangkan dalam kebiasaan berpikir dan tindakan secara konstan dan terus-menerus sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi piawai atau mahir dalam

melakukan atau menciptakan sesuatu. Sejalan dengan (Nurwenda, 2016) menyebutkan bahwa kompetensi merupakan deskripsi tentang segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam suatu profesi, pekerjaan, kegiatan bahkan perilaku dan hasilnya dapat diperlihatkan.

Seorang guru tidak akan terlepas dari profesi utamanya yaitu sebagai pendidik. Sebagai pendidik guru memperoleh pengetahuan ilmu Pendidikan atau yang sering kita dengar pedagogik. Pengertian mengenai pedagogik sendiri sangat beragam. Dalam (Tri Herlambang, 2018) menyebutkan bahwa makna sebagai bidang yang menelaah secara kritis hakikat manusia dan hakikat pendidikan yang meliputi proses, tujuan, serta manfaat pendidikan sebagai upaya dalam mengembangkan segala dimensi dalam hidup dan kehidupan manusia sebagai makhluk yang bereksistensi, serta makhluk multidimensi (memiliki relasi dengan Tuhan, manusia, alam, dan dirinya sendiri) melalui proses pendidikan, yang bertujuan menumbuhkan serta kedewasaan dalam multiaspek.

Dari uraian diatas, kompetensi yang dimiliki seorang pendidik harus relevan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Meninjau dari rendah mutu Pendidikan, maka profesi guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang berkualitas, sebab dengan hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap meningkatkannya mutu Pendidikan. kompetensi pedagogik guru merupakan seperangkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, keterampilan, serta perilaku yang harus dimiliki, dijiwai dan dikuasai oleh guru dalam kegiatan mendidik (Darimi, I :2015) Guru harus memiliki kompetensi pedagogik baik akan dapat mengelola pembelajaran dengan baik serta terarah, sehingga kegiatan pembelajaran

dapat berlangsung secara efektif dan sesuai tujuan yang diharapkan.

Namun dalam praktek dan kenyataannya profesi guru mengalami rendahnya profesionalisme. Akibat dari terkikisnya profesionalisme seorang guru tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu Pendidikan. Hal tersebut telah diidentifikasi apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Berikut beberapa penjelasan faktor yang diungkap menurut (Tri Herlambang, 2018) sebagai berikut:

1. Rendahnya idealisme dan militansi individual.
2. Belum adanya standar profesional guru sebagai tuntutan di negara negara maju.
3. Kemungkinan adanya beberapa perguruan tinggi sebagai pencetak guru yang tidak berorientasi pada kualitas output yang dihasilkan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan.
4. Rendahnya motivasi guru dalam meningkatkan budaya meneliti/ penelitian.
5. Tidak sedikitnya guru yang mau menekuni profesinya secara utuh dan total, yang disebabkan oleh banyaknya guru yang menekuni bidang lain di luar profesinya, sehingga mereka tidak ada waktu untuk senantiasa membaca dan menulis.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, profesionalisme seorang guru yang rendah mampu menurunkan mutu Pendidikan, sebab pada hakikatnya guru adalah jantungnya Pendidikan. Kualitas yang rendah dari seorang guru bukan hanya mempengaruhi mutu Pendidikan tetapi juga akan mempengaruhi kualitas generasi-generasi muda penerus bangsa. Maka dari itu perlu ada nya solusi untuk meningkatkan mutu Pendidikan sehingga generasi muda yang akan datang akan

menjadi generasi penerus yang berkualitas secara holistic.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi adalah suatu pelaksanaan dari sebuah perencanaan. Dalam kebijakan pendidikan tentu implementasi diperlukan dan harus dilakukan. Perancangan kebijakan tentu tidak akan bermakna jika tidak dilanjutkan pada tahap implementasi. Kebijakan pendidikan ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang berisi segala bagian dalam pendidikan. Proses pembuatan kebijakan ini merupakan kegiatan politik yang berlangsung pada tahap kebijakan politis yang mana digambarkan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung satu sama lain dengan diatur urutan waktu yakni agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Hasbullah 2015). Implementasi kebijakan merupakan suatu perwujudan dari kebijakan yang mendasar. Proses kebijakan ini biasanya berisi intruksi atau keputusan perundang-undangan yang mana instruksi ini berisi keputusan yang harus dilakukan untuk menangani masalah, juga untuk menentukan tujuan yang akan dicapai (Wibawa, 1994). Mufiz (1999) menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas dari sebuah kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dan harus menampilkan hasil yang efektif dari kebijakan itu sendiri.

Menurut H.A.R Tilaar kebijakan pendidikan memiliki makna berupa cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mana hal ini akan diwujudkan oleh lembaga sosial di bidang pendidikan yang baik formal, informal, maupun non formal (H.A.R. Tilaar). Seiring dengan perkembangan zaman tentu mengalami banyak perubahan di banyak bidang, dan tentu perubahan ini akan terjadi pula pada bidang pendidikan. Untuk

perubahan terbaru saat ini adalah pergantian kurikulum menjadi program Merdeka Belajar.

Adanya pergantian menjadi sistem merdeka belajar ini dikarenakan banyaknya keluhan para orang tua siswa tentang sistem pembelajaran yang berlaku. Maka dari itu menteri pendidikan menciptakan program kebijakan ini guna memberikan suasana belajar bahagia bagi para siswa maupun guru, juga memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan dari birokratisasi, dosen bebas birokrasi yang terbelit, juga mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih minatnya (Nurwardani, 2020). Bukan hal yang mudah untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, terutama kebijakan ini atas dasar tujuan bersama. Akan semakin sulit ketika terjadi konflik antar kelompok yang saling yang mana setiap tuntutan harus terpenuhi (E. Yuliah 2020).

Implementasi suatu kebijakan tentu memiliki beberapa faktor. Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan implementasi kebijakan ini gagal atau berhasil, yaitu (1) faktor yang pertama ini ditentukan oleh rumusan kebijakan yang sudah disusun sebelumnya oleh pengambil keputusan, yang mana faktor ini menyangkut kejelasan kalimat, ketepatan sasaran, kebijakan ini mudah dipahami atau tidak, serta tingkat pelaksanaannya sulit atau tidak. (2) faktor kedua ini menyangkut personil pelaksana, yang menjadi penilaian disini yaitu mengenai tingkat pendidikan, kepercayaan diri, motivasi, pengalaman, kinerja, komitmen, kesetiaan, serta kualitas kerjasama para pelaksana.

Selain itu latar belakang budaya, bahasa serta ideologi dari para kepartaian pelaksana yang akan mempengaruhi kerjasama kelompok maupun sistem kerja setiap individu dalam menjalankan tugas implementasi kebijakan ini. (3) lalu faktor yang terakhir ini bersangkutan dengan

sistem organisasi pelaksana, yang mana jadi catatan disini adalah menyangkut jaringan sistem, gaya kepemimpinan dari pemimpinnya, aturan organisasi serta sistem-sistem yang diberlakukan atau yang menjadi aturan juga evaluasi yang dipilih dalam organisasi tersebut (A. Rohman, 2009).

Hubungan pedagogik dan kebijakan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan

Kondisi yang sedang dihadapi bangsa dalam bidang Pendidikan sangat ironis. Kualitas mutu pendidik yang rendah berdampak besar pada jati diri bangsa. Nilai-nilai moral serta nilai-nilai norma-norma yang senantiasa melekat pada jati diri bangsa sudah terkikis akibat dari rendahnya mutu Pendidikan.

Pada dasarnya kita mengetahui bahwa dengan Pendidikan taraf hidup serta kualitas kehidupan akan menjadi lebih baik dengan adanya Pendidikan. Namun, perspektif tentang wajibnya Pendidikan di mata masyarakat mulai membelok kearah yang tidak sesuai dengan hakikat serta urgensinya Pendidikan bagi manusia.

Perspektif tentang wajibnya memiliki Pendidikan kini telah bergeser menjadi sebuah kompetisi mencari pangkat, gengsi, serta gelar. Masyarakat yang memiliki perspektif inilah akan mengembangbiakan golongan-golongan yang membudayakan feodalistik dibidang Pendidikan. Sungguh sangat ironi, Pendidikan yang harus merata di seluruh penjuru negeri akan menggenang di suatu wilayah akibat dari adanya budaya feodalistik dalam Pendidikan.

Berdasarkan hal itu, masyarakat dalam memandang Pendidikan akan berambigu dan berbongong-bongong mengejar Pendidikan sebagai statistic atau pengakuan. Hakikat dan esensi dari Pendidikan itu sendiri akan terambil alih

serta tergeser oleh perspektif tersebut. Maka, dari sinilah mutu Pendidikan negara Indonesia rendah dan jauh dari kualitas moralnya. Sebagai salah satu solusi untuk mengurangi problematika mutu Pendidikan rendah, upaya yang harus segera dan terus digemburkan adalah dalam meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik yang dimiliki guru serta meningkatkan dan menentukan kebijakan Pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan.

Kompetensi pedagogik menurut (Sari & Setiawan, 2020) menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik ditinjau dari segi proses pembelajaran, adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam penyelenggaraan pembelajaran peserta didik. Kemampuan atau keterampilan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran guru harus mampu mengelola atau menyelenggarakan pembelajaran yang sangat bermakna serta mampu mencapai tujuan dari belajar. Bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan secara kognitif serta pengembangan potensi keterampilan peserta didik, tetapi juga mampu menumbuhkan jati diri bangsa Indonesia pada peserta didik.

Selain harus mampu mengelola pembelajaran dan menumbuhkan jati diri bangsa, kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru harus mampu mengarahkan perspektif tentang Pendidikan bahwa sejati persoalan atau hakikat Pendidikan itu bukan Cuma untuk mencari pangkat, pengakuan, gelar atau kewajiban belaka tetapi dengan Pendidikan manusia bisa menjadi lebih memanusiaakan manusia, menjadi lebih menjunjung nilai-nilai moral, kesetaraan serta senantiasa menjunjung tinggi adab, martabat yang luhur serta menjadikan suri tauladan untuk generasi yang akan mendatang.

Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa dengan meningkatkan

kualitas mutu kompetensi pedagogik seorang guru yang terampil atau profesional akan mampu merubah perspektif yang menyebutkan bahwa sebuah Pendidikan hanya sebuah pencarian gelar. Dengan keterampilan kompetensi pedagogic yang berkualitas dari seorang guru, proses pembelajaran peserta didik akan dirancang atau disusun sedemikian dan disesuaikan dengan tujuan Pendidikan.

Kompetensi pedagogik yang berkualitas dari seorang guru akan lebih baik atau lancar dalam mencapai tujuan Pendidikan yang bermakna apabila diselaraskan dengan kebijakan Pendidikan yang kompeten pula dalam menegaskan atau mengatur sistem Pendidikan. Dalam (Arwildayanto, dkk, 2018) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu ketentuan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai problematika pendidikan yang menjadi suatu pedoman atau cara bertindak dan sebagai solusi, upaya serta inovasi guna mencapai tujuan pendidikan dari pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.

Hubungan kompetensi pedagogik dengan kebijakan Pendidikan disini artinya adalah kebijakan Pendidikan sebagai kaidah atau norma dalam penyelenggaraan sistem dan penyelenggaraan pembelajaran dalam Pendidikan. Sedangkan dengan kompetensi pedagogik adalah sebagai jembatan wadah pengimplementasi dari kebijakan atau kaidah yang ditentukan dalam Pendidikan serta sebagai disiplin ilmu dari seorang guru dalam mewujudkan tujuan Pendidikan dan menciptakan manusia yang beradab yang menjunjung tinggi harkat dan martabat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Maka dengan kompetensi pedagogic dan kebijakan Pendidikan yang berkualitas mutu Pendidikan di Indonesia akan

meningkat. Kebudayaan feodalistik dalam Pendidikan, perspektif kewajiban Pendidikan yang hanya mencari pengakuan dan gelar akan hilang dalam pemikiran manusia Indonesia. Dengan begitu bangsa Indonesia akan Kembali lagi jati dirinya sebagai bangsa yang luhur akan nilai-nilai moral serta generasi yang akan datang akan menjadi generasi penerus yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan esensi dari Pendidikan tersebut.

Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia perlu dilakukan beberapa upaya agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Demi dilakukannya pemerataan pendidikan pemerintah harus memperhatikan biaya yang akan dialokasikan kepada lembaga pendidikan, membantu masyarakat yang tidak mampu bersekolah karena masalah ekonomi dengan menyalurkan dana bantuan yang sesuai. Untuk meningkatkan kualitas profesional guru harus lebih diperhatikan kesejahteraannya. Kesejahteraan guru harus terjamin agar kinerja guru dapat meningkat dan proses belajar akan optimal. Menurut Aziz, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat memenuhi harapan masyarakat (Aziz: 2017). Penetapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kondisi siswa maupun masyarakat dan pemenuhan sarana prasarana di semua lembaga pendidikan akan membantu peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyyah, R. R., Widyasari, W., Mulyadi, D., Ulfah, S. W., & Rahmah, S. (2019). Guru Berprestasi Sumber Daya Manusia Pengembang Mutu Pendidikan Indonesia. *Journal of Administration and Educational Management (Alignment)*, 2(2), 157-165.
- Arwildayanto, dkk (2018). Kebijakan pendidikan. *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN*, 133.
- Aziz, A. (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Islam*, 10 (2), 2 - 12.
- Darimi, I. (2015). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam Pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 309-324.
- Febriana, R. (2021). Kompetensi guru. Bumi Aksara.
- Hasbullah, H.M. (2015). Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

KESIMPULAN

Mutu pendidikan yang rendah di Indonesia ini disebabkan masih adanya problematika dalam sistem pendidikan. Problematika ini disebabkan dari pemerintah, pemimpin lembaga pendidikan, kompetensi guru, dan lain sebagainya yang masih rumpang pada setiap bagian pemerataan yang bersangkutan dengan pendidikan. Kompetensi pedagogik perlu dipahami guru untuk meningkatkan kompetensinya yang mana setiap pendidik harus dapat menguasai aspek-aspek pedagogik serta memperluas pemahamannya tentang pengetahuan pedagogik. Implementasi dari sebuah kebijakan pendidikan adalah bagian penting demi terealisasinya pembangunan pendidikan.

Hubungan kompetensi pedagogik dengan kebijakan Pendidikan disini artinya adalah kebijakan Pendidikan sebagai kaidah atau norma dalam penyelenggaraan sistem dan penyelenggaraan pembelajaran dalam Pendidikan. Sedangkan dengan kompetensi pedagogik adalah sebagai jembatan wadah pengimplementasi dari kebijakan atau kaidah yang ditentukan dalam Pendidikan serta sebagai disiplin ilmu dari seorang guru dalam mewujudkan tujuan Pendidikan dan menciptakan manusia yang beradab yang menjunjung tinggi harkat dan martabat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

- Jakaria, Y. (2014). Analisis Kelayakan Dan Kesesuaian Antara Latar Belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dengan Mata Pelajaran Yang Diampu. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20 (4), 3 - 8.
- Koyan, I. W. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. UNDIKSHA Singaraja.
- Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Untuk Meningkatkan Mutu Dan Profesionalisme Guru. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi)* (Pp. 2 - 5). Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia*, 1415-1420.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1-13.
- Mufiz, A. (1999). *Pengantar Administrasi Negara* (Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud)
- Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. *Mediasi*, 8(1).
- Nurwenda, W (2016). Kompetensi Pedagogik Guru Geografi Dalam Proses Pembelajaran Di SMA Negeri Se-Kabupaten Bandung (Kompetensi Inti Guru Dalam Menyelenggarakan Pembelajaran Yang Mendidik. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Sari, K. M., & Setiawan, H. (2020). Kompetensi Pedagogik Guru dalam Melaksanakan Penilaian Pembelajaran Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 900-912.
- Suparno, P. (2004). *Pendidikan Dan Peran Guru*. Jakarta: Buku Kompas.
- Tjalla, A. (2010). Potret mutu pendidikan indonesia ditinjau dari hasil-hasil studi internasional.
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Tri Herlambang, Y. (2018). *Pedagogik. Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam Multiperspektif*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik; Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). *Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian. Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*, 80.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.